



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BANDAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT HAK PAKAI
NIB. 04.16.000003004.0

Hak Pakai ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, dengan jangka waktu selama dipergunakan, serta batasan dan kewajiban, pembebasan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan Ilir

Guntur Adi Praponeo
NIP. 197404111993031001

BIDANG TANAH

Bidang tanah ini terletak di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten OGAN ILIR Provinsi Sumatera Selatan seluas 10.780 M² (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi)

PEMEGANG HAK

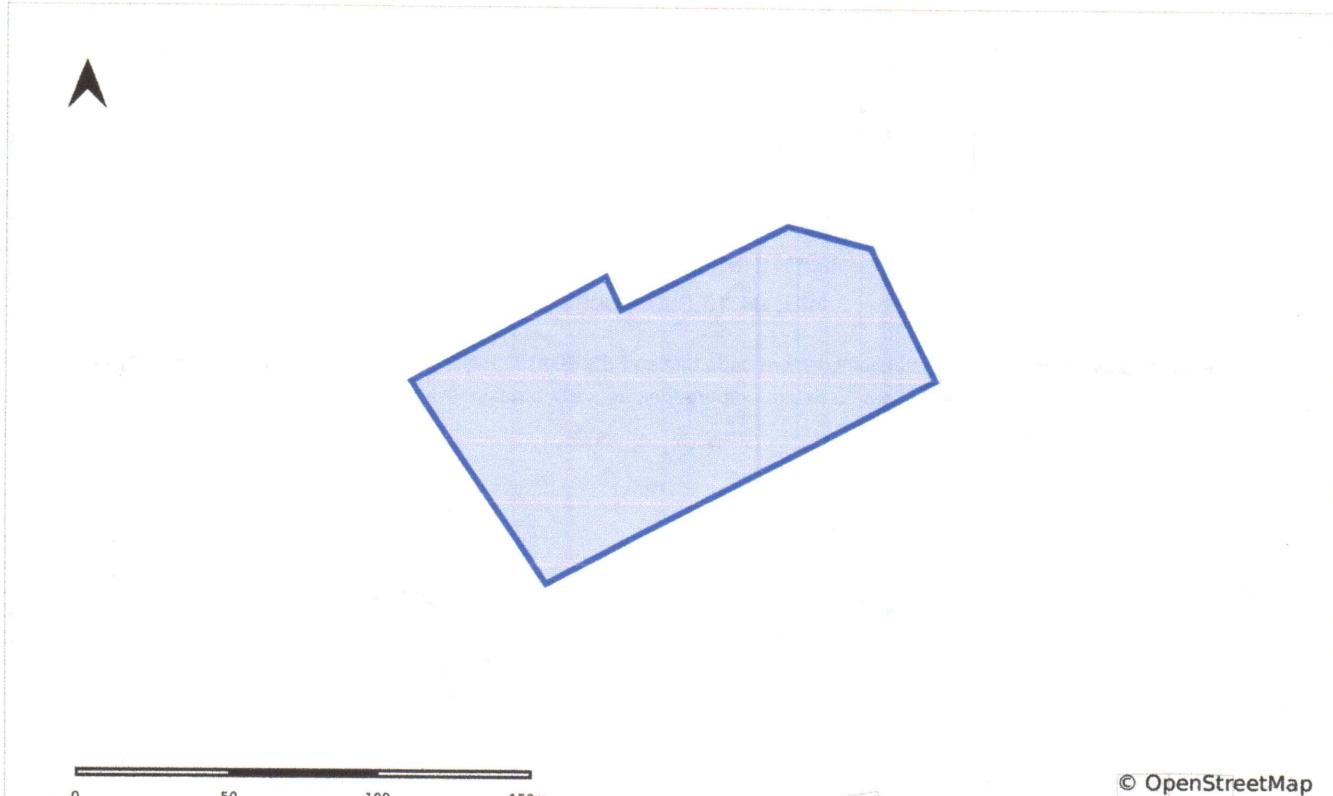
- 1) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN - 1 bagian

BATASAN DAN KEWAJIBAN

Wajib memelihara tanah dan/atau menjaga kesuburan tanah

CATATAN PENDAFTARAN

- 1) Pemberian Hak Pakai berdasarkan Keputusan Nomor 17/HP/BPN-04.16/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025
- 2) Perbaikan Data berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023

LETAK BIDANG TANAH**PERHATIAN**

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertifikat elektronik, halaman pertama sertifikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai QR Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan OpenStreetMap dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Memegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib daftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertifikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.

